

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Standar Akuntansi Pemerintah, yang biasa disingkat dengan SAP merupakan suatu pedoman bagi pemerintah dalam penyajian laporan keuangan untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dan pemahaman antar pemerintah daerah dalam penggunaan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah memang sudah seharusnya disajikan secara relevan dan reliabel serta perlu pengungkapan yang memadai mengenai informasi yang bisa mempengaruhi keputusan. Laporan keuangan yang baik kemungkinan selalu terkendala oleh tindakan kecurangan yang sengaja dilakukan oleh orang yang serakah dan tidak bertanggung jawab (Eliza,2015).

Kecenderungan kecurangan akuntansi biasanya dilakukan oleh pihak di dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Kecurangan akuntansi yang disengaja dilakukan atas dasar untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun bagi perusahaan tersebut. Kecurangan dalam akuntansi terjadi karena tindakan yang disengaja maupun ketidaksengajaan karena kesalahan catat atau akibat erornya suatu sistem akuntansi. Namun, jika kecurangan tersebut dilakukan secara sengaja hal tersebut merupakan suatu pelanggaran etika.

Menurut Wells (2007) kecurangan akuntansi mengacu pada kesalahan yang disengaja yang bertujuan untuk menyesatkan pembaca dan para pengguna laporan keuangan lainnya. Kecurangan akuntansi adalah salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan., yaitu salah saji atau menghilangkan

secara sengaja jumlah nominal atau mengungkapkan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan (Binus,2019).

Berdasarkan SAS (*Statement of auditing standart*) No. 99 (AU 316) dijelaskan bahwa kecurangan akuntansi bisa terjadi karena beberapa macam kondisi yang menyebabkan hal tersebut benar-benar terjadi. Hal ini biasa disebut sebagai segitiga kecurangan (*fraud triangle*), yaitu adanya suatu tekanan untuk melakukan kecurangan, terdapat kesempatan atau adanya situasi yang memungkinkan untuk melakukan suatu kecurangan, serta adanya sikap atau rasionalisasi atau pembenaran atas tindakan kecurangannya.

Pada saat ini banyak sekali terjadi kasus-kasus kecurangan akuntansi. Dalam hal ini, praktik kecurangan akuntansi tidak hanya terjadi pada sektor swasta, tetapi juga banyak terjadi pada sektor pemerintahan (Firdaus,2018). Dampak kecurangan akuntansi yang terjadi di pemerintahan adalah menyebabkan data dan informasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah sangat tidak objektif dan menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja dan membuat suatu keputusan (Wilopo,2006).

Kecurangan akuntansi sangat erat hubungannya dengan etika. Salah satu Teori Perkembangan Moral yang sering digunakan dalam penelitian tentang etika seseorang adalah model Kohlberg. Kohlberg (1971) menjelaskan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahapan *pre-conventional*, tahapan *conventional* dan tahapan *post-conventional*. Kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan ilegal. Menurut Prawira dkk.(2014), secara umum perilaku ilegal adalah bagian dari perilaku tidak etis, oleh karena itu ada hukum yang harus ditegakkan sebagai bagian dari usaha penegakkan standar moral. Menurut

Rodiah,dkk.(2019) moralitas merupakan faktor penting dalam timbulnya kecurangan.

Moralitas berkaitan dengan suatu perbuatan baik ataupun buruk (Aranta, 2013). Seperti hasil penelitian Dewi (2016) yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan kecenderungan individu melakukan kecurangan akuntansi antara individu yang memiliki level moral rendah atau level moral tinggi. Sehingga semakin tinggi moralitas individu maka semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi. Sebaliknya, moralitas yang rendah dapat meningkatkan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Perubahan pada satu level moral, maka akan menyebabkan perubahan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi. Individu yang memiliki level penalaran moral tinggi cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi jika dibandingkan dengan individu yang memiliki penalaran moral yang rendah. Sejalan dengan hasil penelitian Aranta (2013) dan Noviriantini (2015) yang menunjukkan hasil moralitas aparat berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Kusmawati (2016), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Penelitian dari Budiantari (2019) juga menunjukkan bahwa Moralitas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Sebuah study CFE (*Certified Fraud Examiner*) juga menjelaskan seorang individu dengan tingkat integritas tinggi dan tekanan (kebutuhan) serta kesempatan terbatas untuk melakukan *fraud* cenderung bersifat jujur, sebaliknya

dengan individu yang integritas atau moral pribadinya kurang, ketika ditempatkan dalam situasi tekanan kebutuhan yang meningkat dan diberikan kesempatan maka ia akan lebih cenderung melakukan *fraud* dengan alasan asalkan kebutuhannya terpenuhi (James A. Hall,1996).

Selain faktor yang disebutkan di atas, keadilan organisasi juga mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi (Zahro,2015). Keadilan organisasi (*organizational justice*) adalah istilah untuk menggambarkan keadilan pada perusahaan atau lembaga yang berfokus bagaimana para pekerja menyimpulkan apakah mereka para pekerja diperlakukan secara adil dalam pekerjaannya. Menurut Endah (2004) menjelaskan bahwa persepsi karyawan tentang ketidakseimbangan antara masukan (pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, kerajinan, maupun kegigihan dan kerja keras) yang mereka berikan dengan hasil yang mereka terima (gaji, perlakuan ataupun pengakuan) akan menghasilkan emosi negatif yang memotivasi karyawan untuk mengubah perilaku, dan kepuasan mereka.

Bagi seseorang yang merasakan ketidaknyamanan akibat ketidakadilan di organisasi tempat ia bekerja, maka seseorang tersebut akan berusaha untuk memaksimalkan daya guna dirinya dengan bertindak yang menguntungkan dirinya dan merugikan organisasi, seperti melakukan kecurangan. Ketika seseorang mendapat perlakuan yang tidak adil maka akan menimbulkan kecemburuan antar karyawan dan mereka juga akan melakukan perlawanan protes atau membalasnya dengan berdusta dan melakukan kecurangan (Herman ,2013).

Apabila karyawan merasakan ketidakadilan di suatu organisasi, maka akan mengakibatkan karyawan tersebut merasakan tidak dihargai dan merasakan lingkungan kerja yang kurang kondusif, sehingga dapat menimbulkan kemarahan, rasa kebencian dan pemberontakan serta protes kepada organisasi tempat ia bekerja. Hal inilah yang menyebabkan dapat memberikan tekanan atau mendorong seseorang untuk mengambil tindakan yang menyimpang atau tidak sesuai dari aturan yang berlaku demi kepuasannya tercapai seperti berbuat kecurangan (Herman,2013).

Apabila keadilan didalam sebuah organisasi yang dirasakan karyawan sudah terpenuhi dengan baik maka produktivitas kinerja karyawan akan meningkat karena karyawan telah merasakan kepuasan serta keseimbangan antara hak dan kewajibannya, sehingga bisa menghilangkan motivasi untuk melakukan kegiatan yang dapat merugikan perusahaan (Herman,2013). Hal ini didukung dengan hasil penelitian Lisa (2013) yang menunjukkan bahwa keadilan organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan akuntansi. Sama dengan Lisa (2013) hasil penelitian Yuliana (2016) juga menyebutkan bahwa keadilan organisasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Hal ini menunjukkan bahwa apabila karyawan merasakan perlakuan yang adil didalam organisasi tempat ia bekerja maka akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan tidak ada kecemburuan antar karyawan. Sehingga dapat mengurangi tekanan atau motivasi untuk melakukan tindakan kecurangan. Berbeda dengan hasil penelitian Putri (2018) yang hasilnya adalah keadilan organisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

Selain faktor yang disebutkan di atas, yaitu moralitas individu dan keadilan organisasi, kecenderungan kecurangan akuntansi juga disebabkan oleh sistem pengendalian internal (Wahono,2013). Sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi terjadinya kasus penyimpangan di Indonesia dan menjadi upaya yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi kecurangan akuntansi yang mungkin terjadi di dalam suatu entitas usaha.

Pengendalian internal dapat tercapai apabila perusahaan terus mengevaluasi dan meninjau ulang kebijakan dan prosedur yang telah dibuat secara berkesinambungan. Sistem pengendalian internal perusahaan yang lemah akan menjadi salah satu faktor pemicu yang dapat mengakibatkan munculnya kecurangan akuntansi di lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan oleh manajemen dalam penerapan pengendalian internal agar kecurangan tersebut dapat diminimalisir. Pengendalian internal membutuhkan dukungan dari berbagai pihak serta komponen yang mewakilinya di organisasi untuk mencegah terjadinya kecurangan akuntansi.

Sistem pengendalian internal ini sangat berperan penting terhadap kelangsungan perusahaan, dengan sistem pengendalian internal yang baik maka perusahaan dapat melaksanakan seluruh aktifitasnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Saat tujuan perusahaan telah tercapai maka dapat dikatakan bahwa tindakan karyawan dalam perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam perusahaan dan tidak terdapat tindakan yang merugikan perusahaan. Sehingga, semakin baik sistem pengendalian internal maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin rendah.

Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil (Adelin,2013). Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawira (2014) pada BUMD di Kabupaten Buleleng yang memperoleh hasil bahwa efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Zaenal (2013) dan Chandra (2015) juga menunjukkan bahwa efektifitas sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan . Akan tetapi terdapat perbedaan hasil penelitian Permatasari (2018) dimana pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Buleleng merupakan salah satu Kabupaten di Bali yang terus mengalami peningkatan prestasi yang baik dalam pengelolaan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Peningkatan prestasi dimulai sejak 2011. Buleleng naik kelas ke opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WDP itu diperoleh tiga kali secara beruntun yakni audit atas LKPD tahun anggaran 2011, 2012, dan 2013. Barulah dalam audit atas LKPD tahun anggaran 2014, Buleleng naik ke kasta tertinggi opini WTP. Selanjutnya, opini WTP dipertahankan terus sampai sekarang (NusaBali.com,2019).

Terlepas dari prestasi yang dimiliki tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan kecurangan akuntansi didalamnya. Dari kasus yang terangkum dalam Tabel 1 terlihat bahwa kasus *fraud* sering terjadi di sektor pemerintahan salah satunya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng. Seperti

kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Kadis Pekerjaan umum pada tahun 2013 namun kasus tersebut baru dapat diketahui pada tahun 2016, sedangkan LKPD Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2014 sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini dapat menggiring opini masyarakat atau publik mengenai bagaimana sesungguhnya kinerja pemerintah kabupaten Buleleng mengenai pengelolaan keuangan daerah. Walaupun Buleleng telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, namun pada tahun 2018 Kejaksaan Negeri Kabupaten Buleleng menyebutkan bahwa kasus korupsi yang terjadi di Buleleng tergolong tinggi. Hal ini yang dapat melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini dalam menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan individu untuk melakukan *fraud*. Berikut ini beberapa kasus yang pernah terjadi di Buleleng terkait dengan pengelolaan keuangan daerah:

**Tabel 1.1 Data Kasus Kecurangan di Pemerintahan Kabupaten Buleleng**

No.	Kasus	Jumlah Dana yang Digelapkan	Sumber
1.	Mantan Kadis Pekerjaan Umum yang saat itu sedang menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng ditangkap karena diduga korupsi proyek pembangunan jembatan penghubung di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan dan Desa Pegayaman di Kecamatan Suaksada pada tahun 2013 lalu.	Rp. 590.900.000	Koranbuleleng.com Diakses 27 Juni 2020
2.	Kasus korupsi di Tahun 2013 dilakukan oleh mantan Bupati Buleleng dalam upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 1.600.000.000	Kompas.com Diakses pada 20 Februari 2020

	Kehutanan Perkebunan dan Pertambangan (PBB-KPP)		
3.	Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Buleleng Korupsi Dana Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp. 11.000.000.000	Baliantaranews.com  Diakses pada 2020
4.	Seorang ASN yang bertugas di lingkungan Pemkab Buleleng diberhentikan pada 2018 karena terlibat kasus korupsi pada tahun 2014 lalu.		NusaBali.com Diakses pada 22 Oktober 2020

(Sumber: Data diolah, 2020)

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sadewo (2017), Herman (2013), Aranta (2013), dan Eliza (2015) terletak pada lokasi, waktu, dan variabel yang diteliti. Pada penelitian ini akan membahas kembali mengenai pengaruh moralitas individu, keadilan organisasi, dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Adanya inkonsisten hasil penelitian dan saran-saran dari penulis sebelumnya menjadi alasan penulis untuk meneliti kembali variabel moralitas individu, keadilan organisasi, dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dengan demikian, berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Moralitas Individu, Keadilan Organisasi, dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi”**.

## 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1. Kasus kecurangan akuntansi tidak hanya di perusahaan swasta namun juga di instansi pemerintahan, salah satunya di SKPD Kabuapten Buleleng.
2. Tinggi rendahnya level moralitas individu dapat menjadi faktor terjadinya suatu kecurangan akuntansi.

3. Ketidakadilan organisasi yang biasanya dilakukan oleh atasan kepada pegawainya turut menjadi faktor penyebab perilaku kecenderungan kecurangan akuntansi.
4. Adanya kesempatan karena lemahnya pengendalian internal dapat memicu pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan.
5. Peningkatan prestasi pada sektor pemerintahan Kabupaten Buleleng ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa masih adanya kasus kecurangan akuntansi.

### **1.3 PEMBATASAN MASALAH**

Penelitian ini berfokus kepada variabel-variabel yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD Kabupaten Buleleng, yaitu variabel moral individu, keadilan organisasi, dan pengendalian internal.

### **1.4 RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah moral individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi ?
2. Apakah keadilan organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi ?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi ?

### **1.5 TUJUAN PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh moral individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan organisasi individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

## **1.6 MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan suatu pengetahuan tentang perkembangan kecenderungan kecurangan akuntansi khususnya mengenai pengaruh moralitas individu, keadilan organisasi, dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menguji *fraud triangle* teori yang merupakan dasar teori penyebab kecurangan dan Teori Perkembangan Moral merupakan ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Akademisi**

1. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi bagi penulis selanjutnya, terutama penelitian di bidang kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam pengetahuan kecurangan akuntansi.

#### **b. Bagi Penulis**

Bagi penulis hasil dari penelitian ini adalah sebagai sarana pembelajaran terhadap penelitian di bidang ilmiah serta menambah

pengetahuan di dalam bidang akuntansi khususnya kecurangan akuntansi di SKPD Buleleng.

